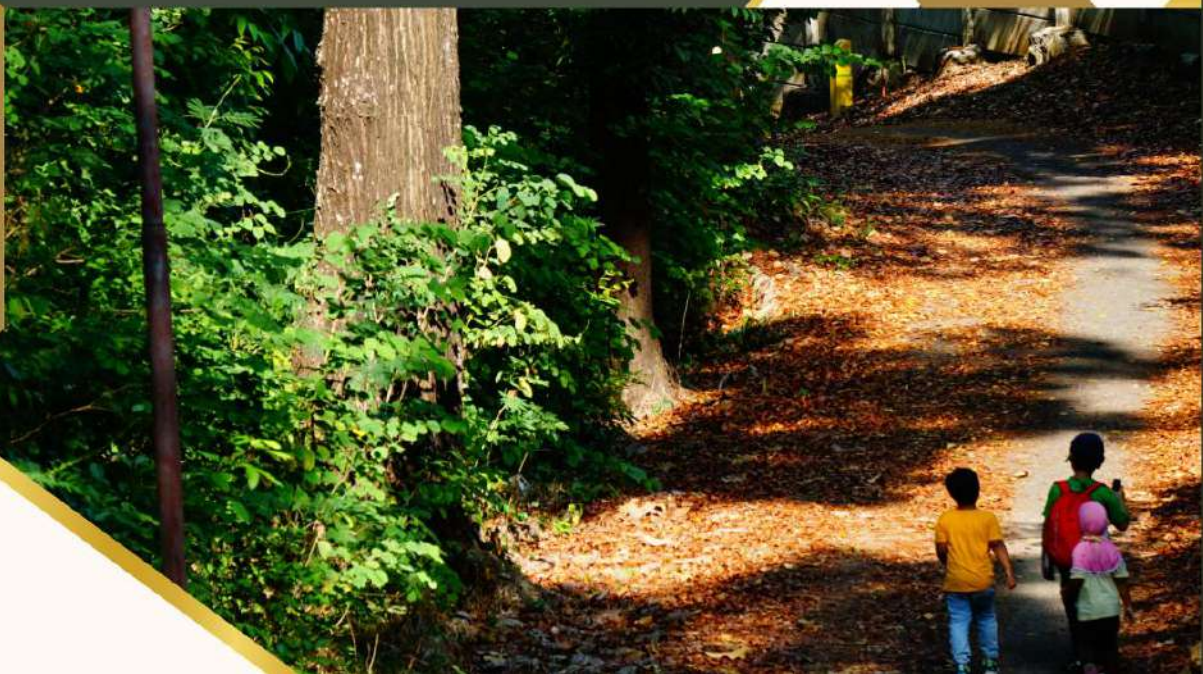




KEMENTERIAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

# RENCANA STRATEGIS BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM WILAYAH IV TAHUN 2025-2029





KEMENTERIAN KEHUTANAN  
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
**BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
WILAYAH IV

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
WILAYAH IV  
NOMOR SK. 50 TAHUN 2025

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA WILAYAH IV  
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
WILAYAH IV

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah IV guna mendukung capaian target kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sehubungan pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah IV.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;
8. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2025 tentang Kementerian Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

- Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
  11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan.

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA WILAYAH IV TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA WILAYAH IV TAHUN 2025-2029
- PERTAMA :** Rencana Strategis Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah IV tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini;
- KEDUA :** Rencana Strategis Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Wilayah IV tahun 2025-2029 ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan daftar pelaksanaan kegiatan anggaran satuan kerja periode tahun 2025-2029;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kadipaten  
Pada tanggal : 1 Desember 2025  
Kepala Balai,



Iman Santoso  
NIP. 197107301997041001

Lampiran Keputusan Kepala Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Wilayah IV  
Nomor SK. 50 Tahun 2025  
Tanggal 1 Desember 2025

**RENCANA STRATEGIS  
BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA WILAYAH IV  
TAHUN 2025-2029**

KADIPATEN, 1 DESEMBER 2025

## KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non-aparatur lingkup Kehutanan. Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut agar lebih efektif, efisien, serta memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam menunjang pembangunan kehutanan, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Balai Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (P2SDM) Wilayah IV Tahun 2025-2029.

Renstra ini menjadi kerangka umum perencanaan strategis Balai dengan mengacu pada Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Kehutanan. Dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi Balai P2SDM Wilayah IV dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian integral dari Renstra BP2SDM. Selanjutnya, Renstra ini akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang merupakan penjabaran lebih rinci dari pelaksanaan tugas dan fungsi Balai.

Agar tercipta konsistensi dalam pola dan mekanisme perencanaan, penyusunan Renja Balai P2SDM Wilayah IV diwajibkan mengacu pada dokumen ini. Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dalam mewujudkan visi, misi, serta pencapaian sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra ini.



Kadipaten, 1 Desember 2025

Iman Santoso, S.Hut., M.H.  
NIP. 19710730199701001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
Daftar Tabel .....	iii
Daftar Matriks.....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1.    Kondisi Umum.....	1
1.2.    Potensi dan Permasalahan .....	6
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2025-2029 .....	7
2.1.    Visi .....	7
2.2.    Misi .....	8
2.3.    Tujuan .....	8
2.4.    Sasaran Strategis.....	9
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN.....	10
3.1.    KEGIATAN .....	10
3.2.    KOMPONEN KEGIATAN .....	10
3.3.    PENGARASUTAMAAN .....	12
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....	14
4.1.    Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan.....	14
4.2.    Target Kinerja.....	15
4.3.    Kerangka Pendanaan.....	15
BAB V PENUTUP.....	17
LAMPIRAN .....	18

### Daftar Tabel

Tabel 1. Target Kegiatan Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2020-2024.....	3
Tabel 2. Kuantitas Capaian Kinerja Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2020-2024.....	3
Tabel 3. Persentase Capaian Kinerja Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2020-2024 .....	4
Tabel 4. Capaian Progres Renstra Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2020-2024.....	4
Tabel 5. Target dan Realisasi Pembiayaan Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2020-2024.....	5
Tabel 6. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2025-2029.....	10
Tabel 7. Komponen Kegiatan Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah IV .....	11
Tabel 8. Target Kinerja Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2025-2029.....	15
Tabel 9. Rencana Alokasi Anggaran Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2025-2029.....	16

### Daftar Matriks

Matriks 1 Analisis SWOT Balai P2SDM Wilayah IV .....	6
Matriks 2. Peta Sasaran/Cascading Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah IV Tahun 2025-2029 .....	14

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Kondisi Umum**

Pembangunan nasional Indonesia tahun 2025-2029 merupakan fase krusial yang menjadi fondasi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Fokus utama pada transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan telah diarahkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, penguatan ekonomi hijau, dan pelestarian lingkungan hidup.

Sektor kehutanan memegang peran penting dalam pembangunan berkelanjutan karena memiliki hubungan yang erat dengan tiga dimensi utama pembangunan berkelanjutan, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sebagai upaya untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dan adaptif menjadi kunci keberhasilan.

Sebagai bagian dari Kementerian Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) diberikan mandat untuk menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing tinggi guna mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Implementasi dari mandat tersebut diwujudkan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di berbagai wilayah, salah satunya adalah Balai P2SDM Wilayah IV.

Balai P2SDM Wilayah IV memiliki cakupan wilayah pelayanan di empat provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sebagaimana Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Balai P2SDM bertanggung jawab melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan, pelatihan bagi aparatur dan non-aparatur, serta pengembangan kompetensi masyarakat dan generasi muda dalam menjaga kelestarian hutan. Keberadaan Balai P2SDM menjadi jembatan antara kebijakan pusat dengan pelaksanaan program di tingkat tapak, terutama dalam memenuhi kebutuhan peningkatan kualitas SDM yang terlibat langsung dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Balai P2SDM menyelenggarakan sejumlah fungsi penting, antara lain:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas kehutanan.
2. Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian hutan.
3. Penyelenggaraan pelatihan teknis dan manajerial bagi aparatur dan non-aparatur guna memperkuat kompetensi kerja di sektor kehutanan.

4. Pengembangan mekanisme penilaian dan uji kompetensi yang akuntabel dan berbasis standar mutu profesional.
5. Memfasilitasi generasi muda dalam mengembangkan perilaku cinta alam dan kewirausahaan kreatif berbasis kehutanan.
6. Pengelolaan kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung transformasi kualitas SDM kehutanan.
7. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja program secara terintegrasi.
8. Penyusunan laporan kinerja yang mencakup aspek tata kelola, keuangan, SDM, dan data informasi secara akuntabel.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai P2SDM Wilayah IV memiliki struktur organisasi yang terdiri atas:



*Bagan 1 Struktur Organisasi Balai P2SDM*

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kelembagaan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Alam (BP2SDM), Balai P2SDM Wilayah IV diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) secara berkala. Renstra ini tidak hanya menjadi instrumen penguatan tata kelola kelembagaan, namun juga wujud komitmen Balai P2SDM Wilayah IV dalam mendukung prioritas nasional dengan berfokus pada pembangunan SDM kehutanan yang berdaya saing dan berorientasi pada keberlanjutan pengelolaan hutan secara nasional.

#### **1.1.1. Capaian Renstra Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2020-2024**

Secara keseluruhan, pelaksanaan kinerja Balai P2SDM Wilayah IV selama periode 2020-2024 berjalan sesuai dengan ekspektasi yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut didasarkan pada sasaran

kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2020-2024. Rincian target kegiatan tersebut tercantum pada Tabel 1.

**Tabel 1. Target Kegiatan Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2020-2024**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Lulusan Diklat Aparatur LHK	Orang	300	30	30	30	60
2		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	Orang	360	240	120	120	240
3		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	Orang	-	120	120	150	150
4		Nilai KHDTK yang dikelola	Poin	66	67	68	69	70
5	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	Orang	-	-	30	150	150

Berkenaan dengan capaian Renstra Balai P2SDM Wilayah IV tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3.

**Tabel 2. Kuantitas Capaian Kinerja Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2020-2024**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kuantitas Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Lulusan Diklat Aparatur LHK	Orang	300	30	30	30	1.119
2		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	Orang	362	366	100	60	201
3		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	Orang	-	120	100	90	1040
4		Nilai KHDTK yang dikelola	Poin	71	68	82	83	83
5	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	Orang	-	-	30	30	60

**Tabel 3. Persentase Capaian Kinerja Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2020-2024**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Persentase Capaian Kinerja (%)				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Lulusan Diklat Aparatur LHK	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	100,56	100,00	100,00	100,00	100,50
3		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	-	100,00	111,11	100,00	100,00
4		Nilai KHDTK yang dikelola	100,00	100,00	120,10	118,72	117,97
5	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	-	-	100,00	100,00	100,00

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada tabel di atas, rincian capaian progres renstra terhadap kelima indikator kinerja utama dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. Capaian Progres Renstra Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2020-2024**

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja	% Progres Renstra
1	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	Lulusan Diklat Aparatur LHK	450	1.509	150,00
2		Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	1.080	1.049	97,13
3		Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	540	1.380	150,00
4		Nilai KHDTK yang dikelola	70	82,58	117,97
5	Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	330	390	118,18
<b>Rata-rata Progres</b>					<b>126,66</b>

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel, dapat disimpulkan bahwa capaian pelaksanaan renstra Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2020-2024 secara umum telah berjalan secara efektif dan berhasil melampaui target yang ditetapkan. Hal ini tercermin dari rata-rata capaian kinerja sebesar 126,66% yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator

kinerja kegiatan (IKK) tidak hanya terpenuhi, namun juga melampaui ekspektasi. Beberapa indikator yang menunjukkan kinerja yang tinggi antara lain indikator lulusan diklat aparatur LHK dan lulusan pelatihan vokasi yang masing-masing mencapai nilai 150%, indikator nilai pengelolaan KHDTK sebesar 117,97%, serta pengembangan SDM wirausaha kreatif di bidang LHK mencapai 118,18%. Meskipun indikator lulusan diklat non-aparatur LHK belum mencapai target, namun capaian kinerjanya berada dalam kategori tinggi dengan capaian sebesar 97,13%.

### 1.1.2. Capaian Penyerapan Anggaran Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2020-2024

Selama periode 2020-2024, Balai P2SDM Wilayah IV memperoleh dukungan anggaran dengan total pembiayaan sebesar Rp65.016.513.000. Alokasi anggaran tersebut didistribusikan secara tahunan untuk mendukung pelaksanaan program strategis, operasional diklat, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Berikut adalah rincian alokasi anggaran selama lima tahun.

**Tabel 5. Target dan Realisasi Pembiayaan Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2020-2024**

No	Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp	Persentase (%)
1	2020	13.650.840.000	13.206.325.627	96,7
2	2021	11.494.654.000	11.467.677.705	99,8
3	2022	11.784.200.000	11.764.921.947	99,8
4	2023	12.257.385.000	12.257.063.139	100
5	2024	15.829.434.000	15.613.003.067	98,6

Berdasarkan alokasi pembiayaan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 5, alokasi anggaran Balai P2SDM Wilayah IV secara umum mengalami fluktuasi setiap tahunnya, baik penurunan maupun peningkatan. Perubahan ini turut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berasal dari instruksi pemerintah pusat.

Meskipun terjadi dinamika dalam alokasi anggaran, kinerja realisasi anggaran Balai P2SDM Wilayah IV selama lima tahun terakhir menunjukkan capaian yang sangat optimal dengan rata-rata serapan di atas 98%. Hal ini mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Namun demikian, selisih pagu dan realisasi pada 2020 dan 2024 menunjukkan bahwa akurasi estimasi anggaran masih perlu ditingkatkan. Tren pagu sempat menurun pada 2020, namun kembali meningkat hingga mencapai titik tertinggi pada 2024, sejalan dengan dinamika kebutuhan

kelembagaan dan penyesuaian kebijakan. Secara umum, capaian ini menunjukkan tata kelola keuangan yang akuntabel serta responsif terhadap dinamika kebijakan fiskal.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah BP2SDM Kementerian Kehutanan, Balai P2SDM Wilayah IV Kadipaten menghadapi dinamika internal dan eksternal yang kompleks. Oleh karena itu, analisis terhadap potensi dan permasalahan menjadi dasar penting dalam penyusunan arah strategis Renstra 2025-2029. Analisis ini menjadi dasar untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Balai P2SDM Wilayah IV dalam melaksanakan mandat pembangunan SDM kehutanan yang sejalan dengan arah kebijakan nasional.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis potensi dan permasalahan Balai adalah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*). Berikut disajikan Matriks Analisis SWOT Balai P2SDM Wilayah IV sebagai hasil pemetaan kondisi strategis terkini lembaga.

### Matriks 1 Analisis SWOT Balai P2SDM Wilayah IV

Faktor	Keterangan
<i>Strengths</i> (Kekuatan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki sumber daya manusia internal yang berpengalaman dan terdidik</li> <li>- Pemanfaatan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) sebagai sarana pelatihan berbasis praktik.</li> <li>- Jejaring kemitraan multipihak (Pemerintah Daerah, LSM, KTH, dan sebagainya).</li> <li>- Reputasi kinerja pelatihan yang konsisten.</li> </ul>
<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum optimalnya sistem pemantauan pasca pelatihan (monitoring dampak).</li> <li>- Keterbatasan regenerasi penggerak swadaya masyarakat, penyuluh, dan widyaiswara muda.</li> </ul>
<i>Opportunities</i> (Peluang)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan kebijakan RPJPN dan transformasi SDM nasional.</li> <li>- Kemajuan teknologi pendidikan dan digitalisasi pelatihan.</li> <li>- Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konservasi dan kewirausahaan hijau.</li> </ul>
<i>Threats</i> (Ancaman)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketimpangan kompetensi dan literasi masyarakat desa hutan dalam menyerap pelatihan berbasis teknologi.</li> <li>- Ancaman bencana dan perubahan iklim.</li> <li>- Potensi perubahan kebijakan fiskal.</li> </ul>

## BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN 2025-2029

### 2.1. Visi

Dalam rangka mendukung pencapaian arah pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta sejalan dengan visi jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045 dengan tema **“Negara Nusantara yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**, Kementerian Kehutanan menetapkan visi untuk periode pembangunan 2025-2029 adalah **“Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat serta Dekarbonisasi Sektor Kehutanan”**. Visi ini mencerminkan komitmen Kementerian Kehutanan dalam memperkuat peran sektor kehutanan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan sekaligus sebagai bagian integral dari upaya mitigasi perubahan iklim dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045, maka ditetapkan delapan (8) agenda pembangunan, yaitu:

1. Transformasi sosial untuk meningkatkan kualitas SDM yang sehat, cerdas, sejahtera, dan berdaya saing.
2. Transformasi ekonomi dalam meningkatkan produktivitas melalui inovasi, iptek, ekonomi hijau, digitalisasi, dan integrasi ekonomi domestik-global.
3. Transformasi tata kelola dalam mewujudkan regulasi dan tata kelola yang adaptif, berintegritas, dan kolaboratif.
4. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dalam memperkuat stabilitas politik, hukum, keamanan, dan diplomasi global.
5. Ketahanan sosial, budaya, dan ekologi dengan membangun masyarakat tangguh, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat modal sosial budaya.
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan daerah.
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola.
8. Kestinambungan pembangunan dalam menjamin keberlanjutan pembangunan melalui pembiayaan inovatif dan pelaksanaan yang efektif.

Sebagai bagian dari struktur organisasi Kementerian Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) turut menetapkan visi yang mendukung pencapaian visi Kementerian Kehutanan, yaitu **“Penguatan Kompetensi SDM Kehutanan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kehutanan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang Berdaya Saing, Responsif, dan Adaptif terhadap Perubahan dalam Mencapai Ekonomi Hijau dan Produktivitas Berkelanjutan”**. Visi ini menggambarkan peran strategis BP2SDM dalam menyiapkan sumber daya

manusia kehutanan yang unggul, adaptif terhadap perubahan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan hutan yang lestari.

## **2.2. Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, Kementerian Kehutanan merumuskan visi sebagai berikut:

1. Mewujudkan perlindungan ekosistem hutan yang terjaga dan mendukung dekarbonisasi hutan.
2. Mewujudkan ekonomi berbasis sumber daya hutan yang lestari.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam pengelolaan hutan secara adil dan setara.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.

Sejalan dengan misi Kementerian Kehutanan, BP2SDM menetapkan misi sebagai berikut:

1. Penguatan manajemen talenta dalam penyiapan SDM kompeten di lingkungan Kementerian Kehutanan.
2. Penyelenggaraan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan Non-Aparatur yang sesuai dengan Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi (AKPK) SDM sektor kehutanan.
3. Pengembangan metode pembelajaran/pelatihan yang efektif dan masif serta meningkatkan kapasitas pengajar pelatihan.
4. Pembangunan KHDTK Hutan Diklat sebagai pusat unggulan pengembangan kompetensi SDM.
5. Meningkatkan nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui peningkatan jumlah KTH yang mandiri.
6. Penguatan komitmen dan sinergi para pihak dalam penyuluhan dan pendampingan masyarakat di tingkat tapak.
7. Meningkatkan serapan tenaga kerja sektor kehutanan dan lulusan SMK Kehutanan Negeri.
8. Penguatan peran generasi pelestari hutan di tingkat tapak untuk pencapaian target NDC sektor kehutanan dan pembangunan kehutanan lainnya.
9. Penguatan sistem tata kelola dan manajemen data yang transparan, akuntabel, dan reliabel.

## **2.3. Tujuan**

Tujuan Kementerian Kehutanan disusun untuk mengarahkan capaian pembangunan sektor kehutanan secara lebih terukur dan strategis, yaitu:

1. Perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan.
2. Meningkatnya potensi ekonomi bidang kehutanan terhadap perekonomian nasional.
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan hutan.

4. Tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Sementara itu, tujuan strategis BP2SDM yang disusun selaras dengan visi dan misi untuk mendukung arah pembangunan nasional yang juga sejalan dengan tujuan Kementerian Kehutanan adalah: **“Menyiapkan SDM Unggul dalam Mendukung Pengelolaan Hutan Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”**. Tujuan ini diharapkan mampu menjadi fondasi bagi tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui penyediaan SDM yang profesional, kompeten, responsif terhadap dinamika perubahan, adaptif, *problem-solving*, komunikatif, serta berorientasi pada inisiatif dan pencapaian target.

#### 2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan strategis yang berfungsi sebagai tolak ukur capaian kinerja Kementerian Kehutanan pada periode 2025-2029. Sasaran ini disusun untuk memastikan bahwa setiap misi dan tujuan dapat dijalankan secara efektif melalui program dan kegiatan yang tepat sasaran. Berikut adalah sasaran strategis Kementerian Kehutanan periode 2025-2029:

1. Terwujudnya perlindungan ekosistem hutan yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap dekarbonisasi sektor kehutanan.
2. Meningkatnya ekonomi melalui pengelolaan dan pemanfaatan hutan lestari.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui akses pengelolaan hutan yang adil dan setara.
4. Terlaksananya tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, lincah, kolaboratif, profesional, dan berdampak.

Dalam kerangka mendukung kinerja Kementerian Kehutanan, BP2SDM berkontribusi langsung terhadap pelaksanaan misi, pencapaian tujuan, dan perwujudan sasaran strategis kementerian, khususnya pada:

- Misi ke-3, yaitu Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan secara Adil dan Setara (T3.SS1).  
Dukungan BP2SDM pada misi ini diarahkan untuk mencapai tujuan meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar kawasan hutan melalui strategi penguatan akses kelola yang adil dan setara.
- Misi ke-4, yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Bidang Kehutanan yang Baik (T4-SS1).

Dalam hal ini, BP2SDM berkontribusi terhadap pencapaian tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan kehutanan yang bersih, efektif, dan berdaya saing dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kualitas layanan publik.

### BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

#### 3.1. KEGIATAN

Berdasarkan program BP2SDM dalam upaya meningkatkan kompetensi SDM Kehutanan melalui penyelenggaraan diklat bagi aparatur maupun non-aparatur, program tersebut kemudian dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan serta komponen yang akan dilaksanakan pada tingkat Unit Pelaksana Teknis/ Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut, sasaran dan indikator kinerja disusun secara relevan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 6. Kegiatan dan Sasaran Kegiatan Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2025-2029**

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
7297 - Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kehutanan	Membangun pendidikan dan pelatihan SDM Kehutanan yang inovatif dan berdaya saing	Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak
		SDM kehutanan yang mendapatkan pengembangan kompetensi
		Nilai efektivitas pengelolaan KHDTK diklat kehutanan
		Luasan pemulihan ekosistem di KHDTK
7320 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup BP2SDM yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah IV
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup BP2SDM	Nilai SAKIP Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah IV
	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkup BP2SDM	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah IV

#### 3.2. KOMPONEN KEGIATAN

Untuk mempermudah sekaligus mendukung pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan, kegiatan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam komponen-komponen kegiatan. Rincian komponen tersebut disajikan pada Tabel 7.

**Tabel 7. Komponen Kegiatan Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah IV**

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan
1.	7297 - Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kehutanan	Membangun pendidikan dan pelatihan SDM Kehutanan yang inovatif dan berdaya saing	Penguatan kapasitas pengelola kasawan hutan di tingkat tapak	- Pelatihan terkait pengelolaan kawasan hutan
			SDM kehutanan yang mendapatkan pengembangan kompetensi	- Pelaksanaan diklat aparatur dan non-aparatur - Pelaksanaan pendukung kediklatan
			Nilai efektivitas pengelolaan KHDTK diklat kehutanan	- Perencanaan KHDTK - Pelaksanaan KHDTK - Kerja sama KHDTK - Pemanfaatan hutan pada areal KHDTK - Pembangunan sarpras/demplot pendukung KHDTK - Pelaporan pengelolaan KHDTK
			Luasan pemulihan ekosistem di KHDTK	- Perencanaan rehabilitasi lahan kritis di KHDTK - Pelaksanaan Rehabilitasi di KHDTK - Pelaporan
2.	7320 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup BP2SDM yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah IV	- Layanan umum - Layanan sarana internal

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Komponen Kegiatan
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup BP2SDM	Nilai SAKIP Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Layanan perkantoran</li> <li>- Layanan BMN</li> </ul>

### 3.3. PENGARASUTAMAAN

Pengarasutamaan merupakan pendekatan strategis untuk memastikan bahwa isu-isu prioritas nasional dan kelembagaan terintegrasi secara sistematis ke dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan BP2SDM. Sebagai bagian dari transformasi kelembagaan BP2SDM, Balai P2SDM Wilayah IV mengintegrasikan empat prinsip pengarasutamaan ke dalam seluruh kegiatan balai. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam membentuk SDM Kehutanan yang adaptif, inklusif, dan berdampak.

#### a. Pengarasutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan melalui isu perubahan iklim, konservasi, serta ekonomi hijau ke dalam kurikulum pendidikan dan penyuluhan. Balai mendorong agar pelatihan dan pendampingan tidak hanya menghasilkan tenaga terampil, tetapi juga mampu menggerakkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam secara lestari sesuai eko-region.

#### b. Pengarasutamaan Gender (PUG)

Dalam bidang kesetaraan gender, Balai memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan memberikan kesempatan yang setara. Modul pelatihan dirancang agar responsif gender dan inklusif, sementara proses rekrutmen peserta maupun fasilitator menekankan prinsip keadilan, partisipasi, dan keterwakilan.

#### c. Pengarasutamaan Transformasi Digital

Melalui transformasi digital, Balai mengembangkan layanan berbasis teknologi untuk memperluas jangkauan pelatihan dan meningkatkan efektivitas administrasi. Pemanfaatan platform *e-learning*, sistem *hybrid training*, serta digitalisasi pelaporan dan evaluasi menjadi langkah strategis dalam mendukung efisiensi tata kelola. Konten pembelajaran dikemas dalam bentuk multimedia interaktif guna meningkatkan daya serap peserta.

#### d. Pengarasutamaan Modal Sosial dan Budaya

Sementara itu, penguatan modal sosial dan budaya diwujudkan melalui pelibatan tokoh adat, komunitas lokal, dan kelembagaan sosial dalam desain serta pelaksanaan kegiatan. Nilai-nilai kearifan lokal dijadikan sebagai bagian penting dalam strategi penyuluhan dan pembinaan SDM, serta didokumentasikan sebagai praktik baik untuk disebarluaskan lintas wilayah.

Dengan mengintegrasikan keempat prinsip pengarasutamaan tersebut, Balai P2SDM Wilayah IV tidak hanya berperan sebagai pusat pengembangan kompetensi, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan kehutanan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan relevan dengan tantangan zaman.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Peta Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan Komponen Kegiatan

Dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan, Balai P2SDM Wilayah IV berperan aktif dalam pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kehutanan melalui peningkatan kompetensi SDM Kehutanan yang berdampak dan relevan. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) secara sistematis dan terukur.

Penyusunan peta *cascading* tersebut bertujuan untuk menggambarkan keselarasan antara arah kebijakan di tingkat Eselon I dengan pelaksanaan teknis di tingkat unit kerja, sehingga seluruh komponen kegiatan yang dijalankan oleh Balai P2SDM Wilayah IV dapat berkontribusi langsung terhadap pencapaian indikator yang telah ditetapkan. Adapun peta sasaran program atau *cascading* Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2025-2029 disajikan dalam Matriks 2.

**Matriks 2. Peta Sasaran/Cascading Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah IV Tahun 2025-2029**

IKSS	IKP	IKK	Satuan Target	Komponen
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	Indeks Pengembangan SDM Kehutanan	Penguatan Kapasitas Pengelola Kawasan Hutan di Tingkat Tapak	Unit	Pengelola Kawasan Hutan yang Ditingkatkan Kapasitasnya
		Proporsi SDM Kehutanan yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi	Orang	SDM Kehutanan yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi
	Nilai Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	Jumlah Unit KHDTK dengan Kategori Pengelolaan yang Efektif	Unit	Pengembangan KHDTK Diklat
		Luasan Pemulihan Ekosistem di KHDTK	Hektar	Rehabilitasi Lahan Kritis di KHDTK Diklat
	Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Nilai Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Poin	Layanan Umum
				Layanan Sarana Internal
	Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Poin	Layanan Perkantoran
				Layanan BMN

#### 4.2. Target Kinerja

Target kinerja untuk setiap kegiatan Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2025-2029 merupakan capaian setiap tahun, dari awal perencanaan (Tahun 2025) hingga akhir perencanaan (Tahun 2029) dan mampu menjelaskan capaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja yang telah disusun. Rincian target indikator kinerja dapat dilihat pada Tabel 8.

**Tabel 8. Target Kinerja Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2025-2029**

SASARAN IKK	IKK	SATUAN	TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029
Membangun pendidikan dan pelatihan SDM Kehutanan yang inovatif dan berdaya saing	Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak	Unit	0	230	300	377	470
	Proporsi SDM Kehutanan yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Orang	420	1210	1380	1560	1770
	Jumlah unit KHDTK dengan kategori pengelolaan yang efektif	Unit	1	1	1	1	1
	Luasan pemulihan ekosistem di KHDTK	Hektar	5	0	0	0	0
Meningkatnya penguatan dan pengawasan internal di lingkup BP2SDM yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai maturitas SPIP BP2SDM	Poin	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup BP2SDM	Nilai SAKIP BP2SDM	Poin	72	74	76	78	80

#### 4.3. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai target kinerja Balai P2SDM Wilayah IV Periode 2025-2029 yang telah ditetapkan perlunya dukungan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Rencana alokasi anggaran Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2025-2029 untuk menunjang Program Penguatan SDM yang Berkelanjutan sekitar Rp38.751.500.000 untuk memenuhi kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur Kehutanan serta Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. Adapun rincian alokasi anggaran terlampir pada Tabel 9.

**Tabel 9. Rencana Alokasi Anggaran Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2025-2029**

KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN (dalam ribuan rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelola kawasan hutan yang ditingkatkan kapasitasnya	-	685.000	878.000	1.035.000	1.355.000
SDM Kehutanan yang mendapatkan pengembangan kompetensi	1.415.000	5.445.000	6.210.000	7.020.000	7.965.000
Pengembangan KHDTK Diklat	457.000	500.000	550.000	600.000	650.000
Rehabilitasi lahan kritis di KHDTK Diklat	-	67.500	-	-	-
Layanan umum	16.000	200.000	250.000	300.000	500.000
Layanan sarana internal	44.000	500.000	600.000	700.000	800.000
Layanan BMN	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## **BAB V PENUTUP**

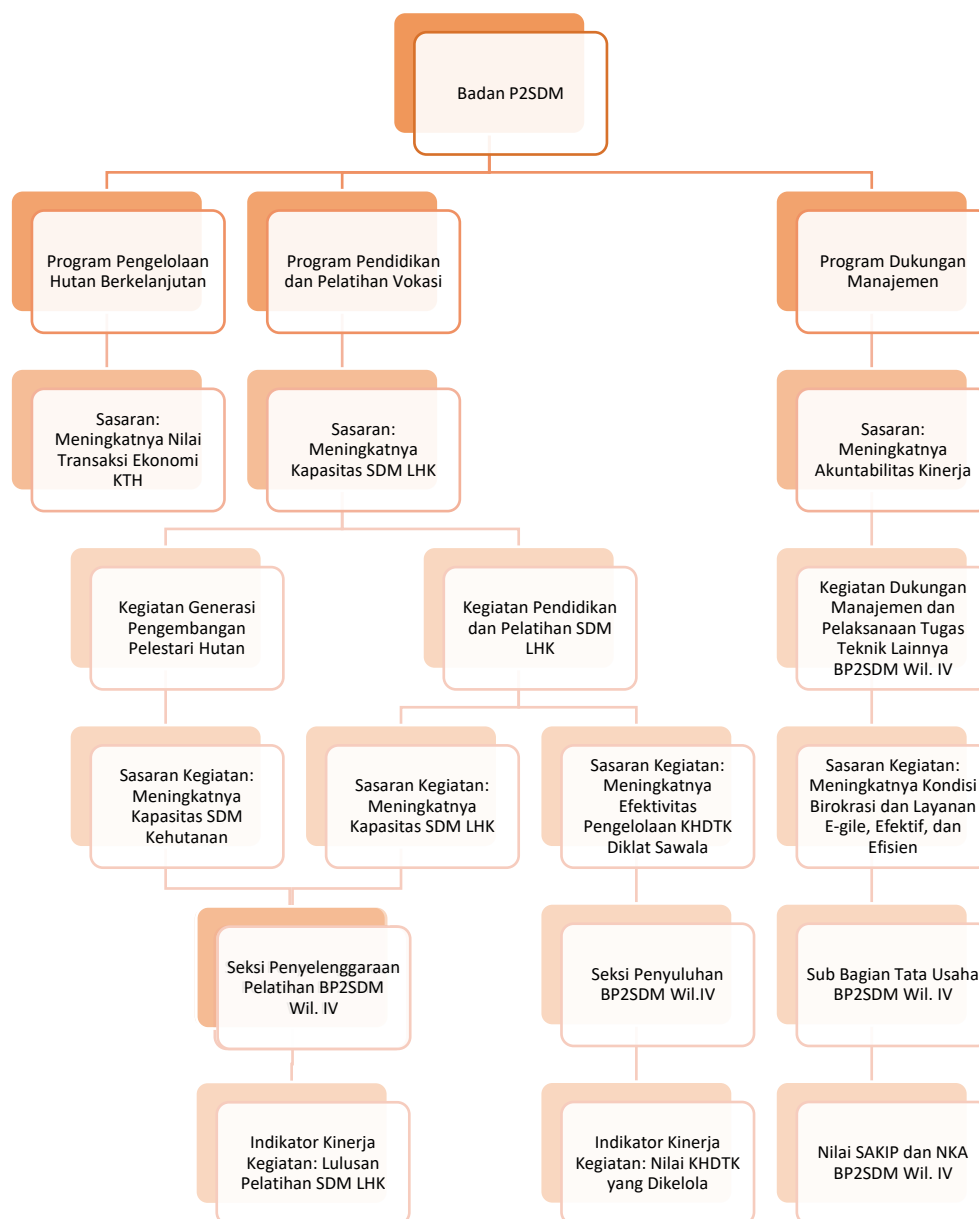
Rencana Strategis Balai P2SDM Wilayah IV disusun sebagai bagian dari upaya mendukung pencapaian sasaran kinerja Renstra Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Dalam penyusunannya, dokumen ini memperhatikan perkembangan isu-isu kebijakan pembangunan kehutanan yang selaras dengan visi dan misi Kementerian Kehutanan.

Mengingat keterbatasan akses data dan informasi terkait pengelolaan diklat dari para pengguna, maka sebagian sasaran kinerja dalam Renstra ini masih bersifat indikatif dan umum. Penetapan target dilakukan dengan merujuk pada hasil evaluasi capaian Renstra Periode 2020-2024. Dengan demikian, Renstra ini diharapkan memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan data dan informasi diklat yang terus berkembang.

Renstra Balai P2SDM Wilayah IV Tahun 2025-2029 sekaligus menjadi pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja Balai P2SDM Wilayah IV untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

# LAMPIRAN

## POHON KINERJA BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA WILAYAH IV



**MATRIKS TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN  
BALAI PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA WILAYAH IV  
TAHUN 2025-2029**

KRO	RO	PELAKSANA KEGIATAN	Satuan	Target					Anggaran (Ribu Rupiah)				
				2025 (eksisting)	2026	2027	2028	2029	2025 (eksisting)	2026	2027	2028	2029
DCE – Pelatihan Bidan Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
		001 – Pengelola Kawasan Hutan yang Ditingkatkan Kapasitasnya											
		Balai P2SDM Wilayah IV	Orang	0	230	300	377	470	0	685.000	878.000	1.035.000	1.355.000
SCE - Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
		001 - SDM Kehutanan yang mendapatkan Pengembangan Kompetensi (RPJMN)											
		Balai P2SDM Wilayah IV	Orang	420	1210	1380	1560	1770	1.415.000	5.445.000	6.210.000	7.020.000	7.965.000
RAG - Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup													
		001 - Pengembangan KHDTK Diklat (RPJMN)											
		Balai P2SDM Wilayah IV	Unit	1	1	1	1	1	457.000	500.000	550.000	600.000	650.000
CEA - Konservasi Kawasan/ Rehabilitasi Ekosistem													
		001 - Rehabilitasi lahan Kritis di KHDTK Diklat (Unit)											
		Balai P2SDM Wilayah IV	Hektar	0	5	0	0	0	0	67.500	0	0	0
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
		962 - Layanan Umum											

Rencana Strategis Balai Penyuluhan dan Pengembangan SDM Wilayah IV Tahun 2025-2029

KRO	RO	PELAKSANA KEGIATAN	Satuan	Target					Anggaran (Ribu Rupiah)				
				2025 (eksisting)	2026	2027	2028	2029	2025 (eksisting)	2026	2027	2028	2029
		Balai P2SDM Wilayah IV	Layanan	1	1	1	1	1	16.000	200.000	250.000	300.000	500.000
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
		951 - Layanan Sarana Internal											
		Balai P2SDM Wilayah IV	Layanan	1	1	1	1	1	44.000	500.000	600.000	700.000	800.000
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
		956 - Layanan BMN											
		Balai P2SDM Wilayah IV	Layanan	1	1	1	1	1	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>TOTAL</b>									<b>1.933.000</b>	<b>7.399.500</b>	<b>8.490.000</b>	<b>9.657.000</b>	<b>11.272.000</b>

**CASCADING & CROSCUTTING BALAI P2SDM WILAYAH IV TAHUN 2025-2029**

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)/ Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder	
T4.SS4	Mewujudkan layanan kementerian menuju birokrasi kelas dunia yang berbasis digital		(IKSS) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kementerian Kehutanan	Kemenuhut	Masyarakat, Kementerian PAN dan RB	
	SP4	Sumber Daya Manusia Kehutanan yang inovatif, berkualitas, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan kehutanan yang berkelanjutan	(IKP 1) Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan P2SDM	LAN, Kementerian PAN dan RB, Unit Eselon 1 Kemenuhut	
		SK1	Membangun pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kehutanan yang inovatif dan berdaya saing	(IKK 1) Penguatan kapasitas pengelola kawasan hutan di tingkat tapak (KPH, KUPS dan PBPH)	Balai P2SDM Wilayah IV	Dit. PHL, Dit. Perhutanan Sosial, Pusdiklat, UPT Layanan, LAN, Pemerintah Daerah, Masyarakat/KTH, KPH, KUPS
				(IKK 2) Proporsi SDM Kehutanan yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Balai P2SDM Wilayah IV	Pusdiklat, UPT Layanan, LAN, Pemerintah Daerah, Masyarakat/KTH
				(IKP 3) Nilai Efektivitas Pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	Badan P2SDM	Dit. Planologi, Universitas
		SK1	Membangun pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kehutanan yang inovatif dan berdaya saing	(IKK 3) Jumlah unit KHDTK dengan kategori pengelolaan yang efektif	Balai P2SDM Wilayah IV	Dit. Planologi, Pusdiklat, UPT Layanan, Masyarakat/KTH
				(IKK 4) Luasan pemulihan ekosistem di KHDTK	Balai P2SDM Wilayah IV	Dit. Planologi, Dit. PDASRH, Pusdiklat, UPT Layanan, Masyarakat/KTH
	SP1	Penguatan pengawasan internal Kementerian yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas		(IKP 1) Nilai Maturitas SPIP Kementerian Kehutanan	Badan P2SDM	BPKP
		SK10	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	(IKK 1) Nilai Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Balai P2SDM Wilayah IV	BPKP, Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal
	SP2	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan		(IKP 1) Nilai SAKIP Kementerian Kehutanan	Badan P2SDM	Kementerian PAN dan RB
SK9		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	(IKK 1) Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Balai P2SDM Wilayah IV	Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal	